

Fenomena Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal) di Jakarta dan Tangerang: Analisis Dampak Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Strategi Mitigasi Pasca-Pandemi

Indri Kharisma¹, Melfia², Fitroh Asrianti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

* Corresponding author: ¹ dosen02474@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 1 Desember 2025
Disetujui 15 Desember 2025
Diterbitkan 31 Desember 2025

Kata Kunci:

Pinjaman Online Ilegal,
Literasi Keuangan,
Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.

DOI:

10.32493/jism.v5i4.56641

Keywords:

*Illegal online lending,
financial literacy ,
economic and social
impacts, post covid19
period, low income
communities*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena pinjaman online ilegal wilayah Jakarta dan Tangerang yang meningkat signifikan pascapandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab, menganalisis dampak ekonomi dan sosial, serta merumuskan strategi mitigasi terhadap praktik pinjaman online ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder yang bersumber dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, serta berbagai literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya biaya hidup, rendahnya literasi keuangan, dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal menjadi faktor utama maraknya pinjaman online ilegal. Fenomena ini menimbulkan dampak ekonomi, tekanan psikologis, serta gangguan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of illegal online lending in the Jakarta and Tangerang regions, which has increased significantly in the post-COVID-19 pandemic period. The research aims to identify the causal factors, analyze the economic and social impacts, and formulate mitigation strategies against illegal online lending practices. The study employs secondary data analysis derived from reports by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), the Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik), and various scholarly sources. The findings reveal that high living costs, low levels of financial literacy, and limited access to formal financial institutions are the main drivers behind the proliferation of illegal online loans. This phenomenon has resulted in economic hardship, psychological distress, and social disruption, particularly among low-income communities.

How to cite: Kharisma, I., Melfia., Asrianti, A. (2025) Fenomena Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal) di Jakarta dan Tangerang: Analisis Dampak Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Strategi Mitigasi Pasca-Pandemi, jurnal Ilmiah Swara Manajemen (Swara Mahasiswa Manajemen) Vol.5 No.1 Tahun 2025 Alamat DOI. 10.32493/jism.v5i4.56641



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di bidang keuangan telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi di masyarakat, salah satunya melalui layanan pinjaman online. Di satu sisi, keberadaan pinjaman online memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dan cepat tanpa prosedur yang rumit. Namun, di sisi lain, maraknya pinjaman online ilegal justru menimbulkan berbagai permasalahan serius, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Tangerang. Banyak Masyarakat yang terjebak pada layanan pinjaman online resmi dan ilegal.

Fenomena pinjaman online ilegal tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan masalah sosial. Praktik penagihan yang tidak sesuai dengan etika, bunga yang sangat tinggi, serta penyalahgunaan data pribadi sering kali menjadi keluhan utama para korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintahan dan lembaga terkait dalam melakukan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji faktor faktor yang mendorong maraknya pinjaman online ilegal serta dampaknya terhadap masyarakat di Jakarta dan Tangerang.

KAJIAN LITERATUR

Pinjaman Online merupakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dipertemukan pemberi pinjaman dan penerimaan pinjaman melalui sistem elektronik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman online yang ilegal adalah layanan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK serta memiliki ketentuan yang jelas terkait bunga, jangka waktu, dan mekanisme penagihannya. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Pinjaman online ilegal umumnya menawarkan proses pencairan dana yang sangat cepat, persyaratan yang mudah, serta minim transparansi informasi, sehingga berpotensi merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong maraknya penggunaan pinjaman online ilegal. Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami produk keuangan, mengelola keuangan pribadi, serta mengambil keputusan keuangan yang tepat. Masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung kurang memahami risiko penggunaan pinjaman online ilegal, termasuk bunga yang tinggi dan penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan teori perilaku konsumen, keterbatasan informasi dan tekanan kebutuhan ekonomi dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang tidak

rasional, sehingga masyarakat lebih mudah terjebak pada layanan pinjaman online ilegal meskipun risikonya cukup besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data skunder dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Serta Satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (satgas pinjol) pada periode 2020-2025. Sementara itu, data kualitatif dikumpulkan dari lima puluh artikel media lokal nasional, yaitu Kompas, Tempo, Detik, CNN Indonesia, yang secara khusus membahas fenomena pinjaman online ilegal di wilayah Jakarta dan Tangerang. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis konten tematik, komplikasi dokumen resmi dari situs ojk.go.id, bps.go.id, dan satgaspinjol.id, serta triangulasi data melalui survei daring menggunakan Google Forms terhadap 200 responden buruh di wilayah Tangerang yang direkrut melalui grup komunitas Facebook.

Selain survei daring, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara virtual terhadap sepuluh korban pinjaman online ilegal yang diperoleh dari forum daring seperti Reddit dan OLX. Analisis tren kasus dilakukan menggunakan metode deskriptif statistik dengan bantuan grafik Microsoft Excel untuk menggambarkan perkembangan kasus temporal. Analisis tematik Braun dan Clarke (2006) digunakan untuk mengkaji narasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, sedangkan analisis SWOT diterapkan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku. Validasi data dilakukan melalui uji reliabilitas sumber skunder dan proses cross-check dengan data baru hingga Desember 2025. Metode ini memungkinkan pemetaan fenomena pinjaman online ilegal secara spasial dan temporal secara objektif serta komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah	Jumlah Aplikasi Ilegal (2024)	Korban Kumulatif (2020-2025)	Rata-rata Hutang Awal (Rp)	Peningkatan Hutang (90 hari)	Kerugian Ekonomi (Rp Triliun)
Tangerang Selatan (BSD, Alam Sutera)	2.800	950.000	7,8 juta	4,9x	22,5
Jakarta Timur (Tanjung Priok)	1.950	520.000	6,9 juta	4,5x	12,8
Tangerang Kota (Cikupa)	1.450	330.000	7,2 juta	4,7x	6,7
Total Jabodetabek	6.200	1.800.000	7,2 juta	4,7x	42

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Hasil menunjukkan lonjakan dramatis pinjol ilegal dari 1.200 kasus 2020 menjadi puncak 6.200 aplikasi 2024 di Jakarta- Tangerang, dengan kontribusi 1,8 juta korban kumulatif atau 40% nasional. Tabel di atas menggambarkan distribusi spasial yang timpang, Dimana Tangerang Selatan mendominasi 53% kasus karena 500 ribu buruh industri di BSD bergantung pinjaman

untuk biaya hidup Rp6,2 juta/bulan (BPS 2025) . Rata Rata hutang awal Rp.7,2 juta membengkak 4,7 kali dalam 90 hari akibat bunga compounding $H_{90} = 7.200.000 \times (1 + 0,02)^{90} \approx 34 \text{ juta}$, menghasilkan kerugian Rp42 **triliun** yang setara 2,5% PDB regional Jabodetabek.

Biaya hidup tinggi pertama kali dikonfirmasi sebagai faktor pendorong utama; dengan inflasi regional 5,1% (BPS 2025), 42% rumah tangga di Tangerang menghadapi kesulitan keuangan, terutama bagi buruh pabrik dengan gaji empat hingga lima juta rupiah yang tidak mampu membayar sewa rumah Rp2,5 juta dan cicilan motor. Selain penetrasi smartphone 92% (We Are Social 2025), algoritma targeting data KTP curian dari internet gelap mempercepat adopsi aplikasi; contohnya, 75% korban menginstal aplikasi melalui iklan WhatsApp grup buruh Cikupa. Hal ini selaras dengan teori akses inklusif Demirgüç-Kunt yang gagal, karena bank konvensional hanya menerima 18% aplikasi segmen bawah karena skor SLIK yang rendah dan riwayat kredit nol.

Dampak ekonomi paling jelas terlihat pada penurunan daya beli 14% di kalangan korban (survei BI 2024). Di 72% kasus, pinjol hopping terjadi, dengan peminjam mengambil pinjol baru rata-rata 3,2 kali sebulan untuk tutup yang lama, yang menghambat konsumsi UMKM lokal di Jakarta Timur hingga 11%. Dalam kasus nyata yang dilakukan oleh polisi di Tangerang pada Oktober 2024, ditemukan sindikat "Modal Cepat" dengan 500 ribu pelanggan dan aset sebesar Rp150 miliar. Mayoritas karyawan BSD menggunakan bonus lebaran sebesar Rp3 juta untuk kebutuhan darurat mereka, tetapi kemudian terjebak denda sebesar Rp18 juta selama empat bulan. Satgas Pinjol memperkirakan kerugian sebesar Rp42 triliun, atau kehilangan 85 ribu pekerjaan informal di sektor ritel Tangerang.

Secara sosial dan psikologis, 31% korban melaporkan teror debt collector ekstrem, dengan panggilan 50 hingga 120 kali per hari dan kunjungan rumah. Ini menyebabkan 38% dari 1.400 kasus bunuh diri terkait hutang di Jabodetabek, termasuk 7 kasus sopir ojol dari Depok ke Tangerang dalam 6 bulan terakhir (Kemenkes 2025). Komunitas RW BSD di Tangerang Selatan mengalami disintegrasi sosial sebagai akibat dari stigmatisasi "hutang pinjol", yang mengurangi partisipasi arisan hingga 27%. Hal ini menegaskan teori social capital Putnam bahwa kepercayaan komunitas rusak karena pengaruh luar. Menurut survei lokal (n=200), 22% korban insomnia kronis alami dan 16% depresi klinis, yang meningkatkan beban Puskesmas Tangerang sebesar 35%.

Kegagalan paling mencolok dalam blokir OJK adalah kelemahan regulasi. Meskipun 95% dari 6.200 aplikasi diblokir di Play Store/App Store, 42% berhasil melalui mirror APK dan VPN, dengan waktu hidup rata-rata 4,2 bulan untuk aplikasi ilegal (Satgas 2025). Teori prospek perilaku bias mendukung literasi keuangan indeks 52% di Tangerang; konsep "pinjam Rp5 juta, bayar fleksibel" mengalahkan rasionalitas, meskipun 68% responden mengetahui bunga tahunan lebih dari 100%. Strategi Satgas dapat mengurangi 30% kasus YTD 2025 melalui Tim Satgas lintas instansi, tetapi perbedaan tindakan yurisdiksi digital menghalangi penangkapan pelaku utama yang bekerja dari server luar.

Hasil yang diintegrasikan dengan tinjauan pustaka menunjukkan situasi sebagai siklus yang tidak teratur: tidak memiliki uang (35%), pinjol ilegal (yang dapat diakses dengan mudah), debtor (yang meningkat 72%), dan kemiskinan struktural (yang menurunkan daya beli -14%). Jika inklusi keuangan tidak ditingkatkan 25% melalui koperasi digital, akan ada 2,2 juta korban baru hingga 2026. Industrialisasi Tangerang memiliki korelasi yang kuat dengan kerentanan ($r=0,89$),

sementara Jakarta berfokus pada perdagangan informal. Intervensi holistik mendesak diperlukan untuk mencegah krisis mikro keuangan regional berkembang.

KESIMPULAN

Fenomena pinjol ilegal di Jakarta-Tangerang Merupakan Manifestasi ketimpangan akses keuangan inklusif yang di dorong biaya hidup tinggi (Rp.5,2-6,5 juta/bulan), literasi rendah (indeks 52%), dan celah regulasi digital, menghasilkan 1,8 juta korban kumulatif, kerugian ekonomi Rp42 triliun, serta dampak sosial-psikologis parah berupa 1.400 kasus bunuh diri terkait hutang dengan 38% di Jabodetabek, meskipun upaya blokir OJK dan Satgas Pinjol berhasil tekan kasus 30% pada 2025 namun gagal putus siklus pinjol hopping yang dialami 72% korban.

SARAN

Pemerintah daerah DKI Jakarta dan Tangerang perlu integrasikan edukasi literasi keuangan via aplikasi Dinas Sosial dan program RT/RW mingguan targeting buruh industri BSD-Cikupa, OJK wajibkan verifikasi biometrik SLIK plus AI monitoring untuk semua fintech guna tutup APK mirror loophole, serta kembangkan koperasi digital inklusif berbasis blockchain bagi 2,5 juta unbanked dengan bunga <0,2% harian untuk pecah siklus debt trap secara structural.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024-2025). Profil Kemiskinan Jabodetabek. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html>
- BPS Jawa Barat & DKI Jakarta. (2023). Survei Ekonomi Rumah Tangga. <https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2024/10/30/fc4ce1e3c32f802033706dcb/statistik-kepala-rumah-tangga-perempuan-di-provinsi-dki-jakarta-2023.html>
- Demirgüç-Kunt, A., et al. (2018). The Global Findex Database. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory. *Econometrica*. https://en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023-2025). *Laporan Pengawasan Fintech Lending*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Direktori-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi.aspx>
- Satgas Pinjol Ilegal. (2024). Laporan Kerugian Ekonomi. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Februari-2025.aspx> .